

**Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  
di Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana pada FISIP  
UPN “ Veteran “ Jawa Timur**



**OLEH:**

**FIKKY RACHMAD S**  
**NPM. 0541010089**

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
SURABAYA  
2010**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, berkat, dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo”**.

Laporan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan kurikulum Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada Ibu Dra. Diana Hertati, Msi sebagai dosen pembimbing. Tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan sehingga penyusunan laporan skripsi ini diantaranya :

1. Dra. Ec. Hj. Suparwati, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. DR. Lukman Arif, M.Si, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra Diana Hertati MSi, Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Bapak Ridho, Kasie Pemerintahan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
6. Bapak Drs. Suprpto.P.U, selaku Kepala Kelurahan Taman Kabupaten Sidoarjo.
7. Bapak Rudi Agus, selaku Sekretaris Kelurahan Taman Kabupaten Sidoarjo.
8. Bapak Tri Sulaksono, selaku Petugas Pemungut Kelurahan Taman.
9. Ibu Puryatin, selaku Petugas Pemungut Kelurahan Taman.
10. Orang tua, serta kakak-kakak terima kasih atas bantuan do'a restu yang di berikan.
11. Buat COMPPAX and GEPUK Lover's dan untuk sahabat dan teman-temanku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan seluruh teman-teman Progdil Ilmu Administrasi Negara '05.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga dengan laporan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan khususnya bagi penulis dan bagi fakultas pada umumnya serta para pembaca.

Surabaya, Agustus 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	12
2.2 Landasan Teori.....	18
2.2.1 Kebijakan Publik.....	18
2.2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	18
2.2.1.2 Langkah-Langkah Kebijakan Publik.....	20
2.2.2 Implementasi Kebijakan.....	21
2.2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan .....	21
2.2.2.2 Model-Model Implementasi Kebijakan .....	23
2.2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan .....	24
2.2.2.4 Pendekatan-Pendekatan Implementasi Kebijakan .....	25
2.2.3 Penyuluhan.....	27
2.2.3.1 Pengertian Penyuluhan.....	27

2.2.3.2 Tujuan Penyuluhan .....	28
2.2.3.3 Metode Penyuluhan .....	28
2.2.4 Pengawasan.....	29
2.2.4.1 Pengertian Pengawasan.....	29
2.2.4.2 Bentuk – bentuk Pengawasan .....	29
2.2.5 Pajak Bumi dan Bangunan.....	30
2.2.5.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	30
2.2.5.2 Asas Pajak Bumi dan Bangunan .....	32
2.2.5.3 Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan .....	33
2.2.5.4 Pengecualian Objek Pajak Bumi dan Bangunan.....	33
2.3 Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	34
2.3.1 Pengertian Pemungutan .....	34
2.3.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan .....	35
2.4 Kerangka Berpikir.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Fokus Penelitian.....	39
3.3 Lokasi Penelitian.....	41
3.4 Sumber Data.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6 Analisis Data .....	45
3.7 Keabsahan Data .....	48

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	51
4.1.1 Letak Geografis.....	51
4.1.2 Visi Misi dan MOTTO Kelurahan Taman.....	52
4.1.3 Keadaan Penduduk.....	53
4.1.4 Status Sosial Ekonomi .....	54
4.1.5 Struktur Organisasi Kecamatan Taman .....	57
4.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Taman.....	58
4.1.7 Struktur Organisasi Kelurahan Taman.....	61
4.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Taman .....	62
4.1.9 Komposisi Pegawai Kelurahan Taman .....	64
4.2 Hasil Penelitian .....	67
4.2.1 Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .....	67
4.2.2 Kendala-kendala yang dapat mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .....	77
4.3 Pembahasan.....	83
4.3.1 Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .....	83
4.3.2 Kendala-kendala yang dapat mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .....	90
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>96</b>
5.1 Kesimpulan .....	96
5.2 Saran .....	98
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Target dan Realisasi PBB di Kelurahan Taman.....	5
<b>Tabel 4.1</b> Pembagian Wilayah berdasarkan RW serta RW.....	52
<b>Tabel 4.2</b> Jumlah Penduduk Kelurahan Taman berdasarkan Jenis Kelamin .....	53
<b>Tabel 4.3</b> Jumlah Penduduk Kelurahan Taman berdasarkan Usia.....	54
<b>Tabel 4.4</b> Jumlah Penduduk Kelurahan Taman berdasarkan Pendidikan .....	55
<b>Tabel 4.5</b> Jumlah Penduduk Kelurahan Taman berdasarkan Mata Pencaharian .....	56
<b>Tabel 4.6</b> Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan.....	65
<b>Tabel 4.7</b> Komposisi Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan.....	65
<b>Tabel 4.8</b> Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan.....	66

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Kerangka Berpikir .....	36
<b>Gambar 2.</b> Analisis Data .....	48
<b>Gambar 3.</b> Struktur Organisasi Kecamatan Taman.....	57
<b>Gambar 4.</b> Struktur Organisasi Kelurahan Taman .....	61



## ABSTRAKSI

FIKKY RACHMAD SYAIFULLAH, 0541010089, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN TAMAN KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO, SKRIPSI, 2010.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan metode analisis data penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dimana dalam penelitian ini digambarkan suatu fenomena dengan jalan mendeskripsikannya. Fenomena dalam penelitian ini adalah proses kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dimana program pemungutan tersebut tertulis dalam suatu aturan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 serta Keputusan Gubernur Nomor 51 Tahun 2002.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah membuat kebijakan mengenai target yang akan dicapai dari pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan. Target ini akan tercapai dengan baik apabila salah satunya didukung oleh partisipasi masyarakat / wajib pajak dalam membayar pajak tersebut. Akan tetapi, dalam praktek pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 pasal 10 ayat (1) maupun pasal 11 ayat (5) tentang Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya masalah tentang proses pembayaran yang diawali dengan penerbitan SPPT serta penyampaian SPPT dan pembayaran PBB maupun mengenai Penyuluhan serta pengawasan yang dilakukan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 51 Tahun 2002. Terutama di desa-desa / kelurahan dihadapkan pada masalah yaitu bagi kebanyakan masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu beban sehingga masyarakat enggan untuk membayarnya. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya sebagian kesadaran dan rasa tanggung jawab yang dimiliki wajib pajak, serta rendahnya sosialisasi tentang PBB secara langsung dari petugas-petugas yang ada di lapangan.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, untuk mengetahui kendala-kendala yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Situs penelitian ini adalah keberadaan dari sebuah Kelurahan Taman Kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil dari wawancara dari informan, sedangkan data sekunder yaitu berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari Kelurahan Taman maupun dari petugas pemungut tersebut. Variabel penelitian ini adalah satu yaitu kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Informan dan responden dalam penelitian ini adalah pegawai Kelurahan Taman yang utamanya menangani pemungutan ini serta dari wajib pajak tersebut.

Fokus dalam penelitian ini adalah proses pemungutan pajak bumi dan bangunan serta kendala-kendala yang dapat mempengaruhi penerimaan.

Hasil dari penelitian tentang proses pemungutan pajak bumi dan bangunan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan karena proses yang terlalu lama serta masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh petugas pemungut pajak bumi dan bangunan.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Kelurahan Taman sudah menjalankan peranannya tapi belum sepenuhnya dapat terlaksana secara maksimal.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peranan pajak dalam pembangunan terasa sangat penting, sebab dana yang dipergunakan untuk membangun bangsa Indonesia sebagian besar dibiayai dari pendapatan pajak. Oleh sebab itu dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pemasukan pajak. Guna mendukung tujuan tersebut perlu adanya peraturan yang mendukung agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai.

Pajak sangat besar artinya, karena peranannya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya melalui reformasi kebijakan perpajakan. Perubahan kebijakan tersebut (peraturan perundang-undangan perpajakan) mengatur sistem perpajakan secara menyeluruh yang sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini dan di masa yang akan datang.

Perubahan yang dilakukan dalam sistem perpajakan yaitu dari *sistem official assessment* menjadi *sistem self assessment*. Dengan adanya perubahan sistem perpajakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam sistem perpajakan secara menyeluruh, administrasi pajak harus efisien dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu tidak menyulitkan baik pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak maupun wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2003:1).

Dalam pembiayaan pembangunan suatu daerah, pemerintah daerah membutuhkan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Dengan adanya pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah dan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan untuk mengatur sumber-sumber penerimaan daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat (2) terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam penerimaan dana perimbangan, salah satunya merupakan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Meskipun PBB memiliki nilai rupiah kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya tetapi memiliki dampak yang luas, sebab hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah

yang bersangkutan. PBB mempunyai wajib pajak terbesar dibandingkan dengan pajak-pajak yang lain. Di samping itu merupakan satu-satunya pajak yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Kebijakan pemerintah yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada daerah, sebagaimana disebutkan pada pasal 14 Undang-Undang tersebut, yaitu Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur dan atau Bupati/Walikota. Sedangkan dalam pelaksanaan selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Camat dan Lurah selaku perangkat daerah Kabupaten/Kota.

Dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut pemerintah daerah berusaha membuat kebijakan-kebijakan untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat kepada masing-masing pemerintah daerah. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah antara lain adalah menetapkan target-target yang harus dicapai oleh daerah di tingkat bawahnya, sampai dengan tingkat desa/kelurahan. Dimana pemungutan di tingkat desa/kelurahan merupakan ujung tombak dari kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara keseluruhan, karena di tingkat desa/kelurahan para petugas pemungut akan berhadapan langsung dengan masyarakat wajib pajak.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk

tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hokum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak sendiri.

Masih cukup banyak rakyat yang tidak sadar akan kewajiban – kewajibannya, yang seharusnya mereka malu bahwa untuk kepentingan – kepentingannya, untuk kepentingan anak cucunya mereka enggan memenuhi kewajibannya yang hanya setahun sekali dan jumlahnya tidak seberapa. Dapat diumpamakan bahwa mereka yang hidup demikian adalah bagaikan benalu yang ingin hidup secara menumpang pada kehidupan orang lain yang sadar akan kewajibannya. Mereka tidak sadar untuk memenuhi kewajiban PBB-nya seakan buta atau menutup mata akan adanya jalan – jalan dan sarana perhubungan lainnya yang mereka gunakan setiap hari. Mereka buta atau sengaja membutakan dirinya terhadap segala sesuatu yang mereka perlukan, yang adanya sarana – sarana dan aparatur memerlukan sejumlah biaya besar.

Upaya untuk memperlancar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan para aparatur/petugas juga mempengaruhi tercapai atau tidaknya target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan. Dimana untuk memperlancar penarikan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diperlukan aparatur yang berkualitas, karena para petugas adalah para pelaku yang terlibat langsung dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Adapun data yang diperoleh dari Kelurahan Taman bahwa target dan realisasi penerimaan PBB selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi PBB di Kelurahan Taman**

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
1.	2005	73.107.267	69.232.581	94,7
2.	2006	82.739.737	62.268.425	75,26
3.	2007	100.663.882	76.197.564	75,70
4.	2008	109.241.278	77.544.937	70,99
5.	2009	113.921.972	75.188.501	66

Sumber : Kantor Kelurahan Taman, 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir penerimaan PBB selalu gagal untuk memenuhi target PBB yang telah ditetapkan yaitu mencapai 100%. hal ini menunjukkan masih ada sebagian wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran PBBnya karena kurangnya kesadaran dari masyarakat tersebut. Salah satu usaha dari Kelurahan untuk meningkatkan target PBB dilakukan cara pemberian penyuluhan kepada wajib pajak tentang arti pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak serta meningkatkan kedatangan para petugas pemungut kepada wajib pajak yang menunda pembayaran PBBnya dan melakukan pengawasan terhadap petugas pemungut yang ada di lapangan.

Menurut Friedrich dalam Winarno (2007 : 17) dikatakan bahwa Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau

merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak terlepas dari usaha-usaha yang dilakukan oleh petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan mulai dari penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sampai dengan pendataan yang diterima dari hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, termasuk di dalamnya adalah proses administrasi yang dijalankan.

Pada pelaksanaan di lapangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilihat pada pelaksanaan beberapa bagian dari proses pemungutan itu sendiri, yang meliputi : Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Pemberian Penyuluhan serta Pengawasan sebagai kebijakan Pemerintah dalam memenuhi target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta kendala-kendala yang dapat mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1994 pasal 10 tertulis bahwa “berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SPPT untuk disampaikan kepada masing-masing Kepala Kelurahan. Namun, pada dasarnya dilakukan oleh petugas dari masing-masing RT namun pada masyarakat ditemukan bahwa yang menyampaikan SPPT adalah petugas kelurahan. Serta masih ditemukan kendala-kendala, antara lain objek pajak tidak sesuai dengan yang dimiliki wajib pajak serta kurangnya sosialisasi tentang PBB secara langsung dari petugas yang ada di lapangan. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Nurul selaku petugas loket PBB di kecamatan, pada 5 Januari 2010 :

“Dalam penyampaian SPPT yang melakukan adalah pegawai dari kelurahan yang didampingi oleh petugas masing-masing RT. Penyampaian SPPT ini masih ditemukan kendala-kendala diantaranya Objek pajak tidak sesuai dengan yang dimiliki oleh wajib pajak serta rendahnya sosialisasi tentang PBB secara langsung dari petugas-petugas yang ada di lapangan”.

Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Nurul ternyata dalam penyampaian SPPT masih belum terimplementasi secara baik sesuai UU No. 12 Tahun 1994 pasal 10 ayat (1) bahwa terdapat kendala-kendala, seperti masih rendahnya sosialisasi tentang penyampaian SPPT kepada wajib pajak.

Sementara mengenai masalah pembayaran PBB sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1994 pasal 11 tertulis bahwa “pembayaran PBB dilakukan di bank maupun kantor pos yang telah ditunjuk oleh menteri Keuangan”. Namun kenyataannya masyarakat lebih memilih untuk membayar melalui pegawai yang datang ke wilayah masing-masing. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Nurul selaku petugas loket PBB di Kecamatan pada 5 Januari 2010 yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat cenderung lebih memilih membayar melalui pegawai yang datang ke wilayah masing-masing atau ke loket yang ada di kecamatan karena dianggap cenderung tidak membuang biaya yang terlampau besar dibandingkan membayar melalui bank maupun kantor pos”.

Sementara mengenai masalah pembayaran juga belum terimplementasi secara baik sesuai dalam UU No. 12 Tahun 1994 pasal 11 ayat (5) yang tertulis bahwa “pembayaran PBB dilakukan di bank maupun kantor pos yang telah ditunjuk oleh menteri Keuangan”. Akan tetapi masyarakat lebih memilih membayar melalui petugas yang datang ke wilayah masing-masing daripada melalui bank atau kantor pos maupun melalui loket pembayaran yang ada di Kecamatan. Hal ini akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh tim intensifikasi kecamatan kepada masyarakat tentang mekanisme pembayaran PBB.



Serta masih banyaknya ditemukan wajib pajak yang menunggak pajaknya, seperti yang diberitakan dalam harian Jawa Pos, Rabu 24 Februari 2010 bahwa masih banyak ditemukan wajib pajak yang telambat memenuhi kewajibannya.

Hal inilah yang mengakibatkan pendapatan yang diperoleh melalui PBB menurun. Masyarakat tidak memiliki inisiatif sendiri dalam melakukan pembayaran. Sementara itu masih terdapat komunikasi yang belum efektif dan sikap petugas kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa “Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data subjek pajak dan objek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terhutang sampai pada kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya”.

Mengingat betapa pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber Keuangan Negara dalam rangka untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemerintahan maka, diperlukan adanya penanganan dan perhatian yang serius dari semua pihak. Baik mengenai petugas pemungut, wajib pajak, maupun mengenai proses pelaksanaan pemungutan itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan judul penelitian : **“ Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kabupaten**

**Sidoarjo “.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Setiap tahun pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, membuat kebijakan mengenai target yang akan dicapai dari pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan. Target ini akan tercapai dengan baik apabila salah satunya didukung oleh partisipasi masyarakat / wajib pajak dalam membayar pajak tersebut.

Akan tetapi, dalam praktek pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 pasal 10 ayat (1) maupun pasal 11 ayat (5) tentang Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya masalah tentang proses pembayaran yang diawali dengan penerbitan SPPT serta penyampaian SPPT dan pembayaran PBB maupun mengenai Penyuluhan serta pengawasan yang dilakukan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 51 Tahun 2002. Terutama di desa-desa / kelurahan dihadapkan pada masalah yaitu bagi kebanyakan masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu beban sehingga masyarakat enggan untuk membayarnya. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya sebagian kesadaran dan rasa tanggung jawab yang dimiliki wajib pajak, serta rendahnya sosialisasi tentang PBB secara langsung dari petugas-petugas yang ada di lapangan.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas maka peneliti merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian, yaitu : “Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Taman Kecamatan Taman

Kabupaten Sidoarjo?”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Penulis

Sebagai wawasan dan pengalaman serta menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

2. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan yang berarti bagi instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam upaya penyempurnaan dan peningkatan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di waktu yang akan datang.

### 3. Bagi Fakultas

Sebagai referensi yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti lainnya yang ingin mengembangkan pokok kajian serupa di masa mendatang, serta untuk memberikan tambahan literature perpustakaan.